

REKOMENDASI ALTERNATIF SOLUSI BAGI INDUSTRI DALAM MEMFORMULASIKAN TANTANGAN PENGELOLAAN DAERAH RAWA-GAMBUT (STUDI KASUS: STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OLEH INDUSTRI DENGAN SKEMA AGRO-FORESTRY DI DAERAH RAWA GAMBUT)

Dwi Sushanty

Program Studi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Indragiri
Kampus 1 UNISI, Jln. Provinsi, Parit 1 Tembilahan, Indragiri Hilir, Riau
Email: dwisushanty06@gmail.com

ABSTRAK

Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah rawa, gambut terluas di Provinsi Riau dengan luas 998.610 Hektar. Industri berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki tanggungjawab sosial untuk memberdayakan masyarakat sekitar dalam meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan penelitian ini adalah memberikan rekomendasi atas tantangan-tantangan yang dihadapi industri dalam memberdayakan Masyarakat rawa gambut dalam skema agroforestry. Berdasarkan penelitian mendalam, strategi dalam mengatasi tantangan pengelolaan lahan rawa gambut untuk pemberdayaan Masyarakat oleh industri dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar berdasarkan SDGs yaitu (1) Pilar Sosial dengan membangun kesadaran dan pengetahuan Masyarakat; (2) Pilar Ekonomi yaitu Penciptaan akses pasar, fasilitasi pengembangan hasil hutan bukan kayu, dan akses permodalan sehingga Masyarakat mudah dalam mengembangkan usaha dan terhindar dari ketergantungan kepada middleman; (3) Pilar lingkungan yaitu dengan membangun infrastruktur tanggul, saluran dan pintu klep sehingga tidak terjadi intrusi air asin dan muka air gambut tetap lembab untuk menghindari karhutla; (4) Pilar Hukum tata Kelola strategi terbaik yaitu Perhutanan Sosial.

Kata Kunci: Gambut, Agro-Forestry, Pemberdayaan, Kesejahteraan

ABSTRACT

Indragiri Hilir is one of the largest peat swamp areas in Riau Province, with an area of 998,610 hectares. According to Law Number 40 of 2007, the industry has a social responsibility to empower the surrounding community to improve their welfare. The purpose of this study is to provide recommendations on the challenges faced by the industry in empowering peat swamp communities in agroforestry schemes. Based on in-depth research, strategies for overcoming the challenges of peat swamp land management for Community empowerment by industry can be grouped into 4 pillars based on the SDGs namely (1) Social Pillar by building Community awareness and knowledge; (2) The Economic Pillar, namely creating market access, facilitating the development of non-timber forest products, and access to capital so that people can easily develop businesses and avoid dependence on middlemen; (3) The environmental pillar, namely building embankments, canals and valves so that saltwater intrusion does not occur and the peat water table remains moist to prevent forest and land fires; (4) Legal Pillar of the best strategic governance, namely Social Forestry.

Keywords: Peat, Agro-Forestry, Empowerment, Welfare

I. PENDAHULUAN

Daerah gambut merupakan kawasan dengan kondisi eksisting yang sebagian besar berupa kawasan hutan dan lahan gambut yang mudah terbakar, hal tersebut jika tidak diimbangi dengan meningkatkan kewaspadaan dengan mengenali kerentanan dalam menghadapi bencana kebakaran dikhawatirkan dampak dan kerugian menjadi lebih besar. Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul dipermukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (ground fire) dan kebakaran permukaan (surface fire) [1]. Indragiri Hilir merupakan salah satu daerah rawa, gambut terluas di Provinsi Riau dengan luas 998.610 Hektar [2].

Industry berdasarkan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki tanggungjawab sosial untuk memberdayakan masyarakat sekitar dalam meningkatkan kesejahteraannya. Untuk menjawab tantangan dari regulasi tersebut di atas, Dunia industry menghadapi tantangan atas kondisi eksisting daerah rawa gambut yang berbeda dengan kondisi lahan mineral [3].

Agroforestry merupakan salah satu sarana yang efektif untuk pemerataan dan tahapan untuk mengatasi kemiskinan di lingkungan masyarakat desa hutan, yang bisa meningkatkan pendapatan dan produksi pangan. Agro-forestry juga menjadi strategi yang dapat digunakan dalam memberdayakan potensi besar lahan rawa gambut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran serta alternatif solusi dalam memberdayakan Masyarakat lahan rawa gambut dalam skema agroforestry sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya [4].

II. METODELOGI PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat kawasan rawa dan gambut.

Tujuan penelitian ini adalah memberikan rekomendasi atas tantangan-tantangan yang dihadapi industry dalam memberdayakan Masyarakat rawa gambut dalam skema agroforestry

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan Analisa yang mendalam terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi industry dalam mengelola agroforestry rawa-gambut dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat rawa gambut.

Data Penelitian ini merupakan best practices yang telah dilakukan oleh multi sektor (Pemerintah, Dunia usaha, Akademisi dan NGO) dalam membangun kemitraan pemberdayaan masyarakat industry. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data aktivitas pemberdayaan masyarakat pesisir
2. Data *best practices* pemberdayaan Masyarakat pesisir

Analisa penelitian ini dilakukan berdasarkan *Clustering* sesuai pilar Sustainable Development Goals yaitu Sosial, Ekonomi, Lingkungan dan Hukum Tata Kelola yang baik [5].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian dan desk-review kepada berbagai pihak, maka diperoleh tantangan dan alternatif solusi dalam menjawab tantangan tersebut.

Tabel 1 Tantangan dan Alternatif Solusi

No	Tantangan	Alternatif Solusi
Pilar Sosial		
1	Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat	Penyadaran dan aktivitas Knowledge Sharing tentang keunggulan Agro-Forestry di Daerah Rawa-Gambut Mengadvokasi dengan pendekatan evidence based
Pilar Ekonomi		
2	Masyarakat lebih memilih Pertanian Monokultur dibandingkan Agroforestry	Fasilitasi Pemasaran Produk Agroforestry Mengadvokasi keunggulan ekonomi Agroforestry dengan pendekatan evidence based
3	Hanya menghasilkan produk mentah tanpa adanya nilai tambah	Fasilitasi dan Pelatihan pengolahan produk hasil hutan bukan kayu (Non-Wood Forest Product) seperti Madu, Dodol Nipah, Sirup Pidada, dll
4	Kurangnya akses permodalan	Fasilitasi Masyarakat dalam akses permodalan dan memfasilitasi pendirian koperasi
5	Masyarakat bergantung pada Middleman (Taokeh) sehingga terjadi Parton-Klien Relationship yang mengakibatkan selisih harga yang mencolok antara harga	Dengan menyediakan koperasi/asosiasi akan membantu CF menjual hasil panen mereka dengan harga yang wajar dan membantu CF

Dwi Sushanty : Rekomendasi alternatif solusi bagi industri dalam memformulasikan tantangan pengelolaan daerah rawa-gambut (studi kasus: strategi pemberdayaan masyarakat oleh industri dengan skema agro-forestry di daerah rawa gambut)

No	Tantangan	Alternatif Solusi
	pasar dengan harga ditingkat petani dan petani terlilit utang pada Middleman	mengakses modal dan peralatan
Pilar Lingkungan		
6	Intrusi Air Asin dan Banjir Pasang yang dapat mempengaruhi kualitas air, unsur hara dalam tanah, erosi, dan merusak tanah	Reforestasi Mangrove dapat membantu mencegah atau memperlambat intrusi garam, abrasif, dan juga dapat memberikan jasa ekosistem berharga lainnya Bendungan dan pintu katup pasang surut dapat mencegah masuknya air asin ke daratan
7	Deforestasi Mangrove berlebihan untuk memenuhi permintaan bahan bangunan (kasus silvofishery : Mangrove merupakan “rumah dan penyedia makanan” dalam rantai makanan, sehingga jika mangrove rusak akan berdampak pada hasil perikanan)	Advokat penerbitan Keputusan Kepala Daerah tentang moratorium pemanfaatan mangrove untuk penguatan struktur pondasi bangunan
8	Eksplorasi sumber daya alam yang berlebihan berdampak pada penurunan muka air gambut sehingga rentan terhadap kebakaran hutan	Untuk memastikan tidak terjadi penurunan muka air gambut, solusi alternatifnya antara lain Reboisasi mangrove, membangun sekat kanal dan bendungan untuk mempertahankan kelembaban gambut, Setelah bendungan didirikan dan aliran air diperlambat atau dihentikan, proses suksesi alami dapat terjadi untuk mengisi genangan air di belakang setiap bendungan
9	Memanfaatkan limbah produksi agro-forestry untuk menciptakan produk sehingga dapat mengurangi dampak lingkungan	Menciptakan produk yang berasal dari limbah produksi agro-forestry.
Pilar Hukum dan Tata Kelola		
10	Konflik Tenurial; Masyarakat adat dan masyarakat setempat tidak memiliki hak untuk mengusahakan kawasan hutan	Pemerintah Indonesia memberikan hak kepada masyarakat adat dan masyarakat setempat untuk mengolah hutan secara lestari sesuai dengan nilai dan tradisi mereka sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan mereka

3.1. Pilar Sosial

Tantangan yang dihadapi pada Pilar Sosial yaitu Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran masyarakat dalam agro-forestry. Strategi menyadarkan Masyarakat dengan pendekatan berbasis bukti perlu dilakukan. Pada strategi ini dibutuhkan Fasilitator dan juru kampanye yang handal sehingga dapat merubah pola pikir dan pengetahuan Masyarakat.



Gambar 1 Aktivitas Transformasi Pengetahuan Masyarakat

3.2. Pilar Ekonomi

Kendala terbesar yang diharapkan dalam pilar ekonomi adalah

1. Masyarakat lebih memilih Pertanian Monokultur dibandingkan Agroforestry dan Kurangnya akses permodalan
Kendala ini disebabkan karena pemasaran produk mono kultur lebih mudah dari pada agroforestry, karena pada umumnya mono kultur merupakan supplier diskala industry. Strategi untuk meng-address ini adalah disediakan koperasi untuk membeli produk dan menjualkan dalam skala besar.
2. Hanya menghasilkan produk mentah tanpa adanya nilai tambah.
Untuk meng-address kendala ini yaitu perlu dilakukan pelatihan-pelatihan kepada Masyarakat tentang pengolahan produk hutan bukan kayu.
3. Masyarakat bergantung pada *Middleman* (Taokeh) sehingga terjadi Parton-Klien Relationship yang mengakibatkan selisih harga yang mencolok antara harga pasar dengan harga ditingkat petani dan petani terlilit utang pada *Middleman*

Hubungan *Patron-Client* digambarkan dengan adanya sistem ketergantungan masyarakat petani kecil secara permanen dengan induk semang. Kemandirian masyarakat petani kecil terhambat karena terjebak sistem ijon yang berkembang secara turun temurun. Keluar dari cengkraman patron adalah salah satu upaya untuk menyebabkan petani semakin mandiri. *Off – farm employment creation* telah diajukan sebagai alternatif model pengembangan ekonomi masyarakat kecil.

Hubungan patron-klien yang menyebabkan terjadinya pemiskinan karena ketergantungan yang menahun antara petani tradisional, pengumpul, tokeh (pemilik perahu/ kapal maupun mesinnya) yang juga digambarkan sebagai pemilik faktor produksi. Hubungan yang terjadi bersifat *langgeng* akan tetapi secara tidak langsung telah terbentuk sistem kapitalis yang sangat merugikan kaum

petani. Hal ini terbukti dengan realita bahwa tidak banyak petani yang mengalami kemajuan [6].

3.3. Pilar Lingkungan

Strategi dalam mengatasi masalah di sektor lingkungan yaitu:

1. Menjaga muka air gambut agar tetap lembab sehingga terhindar dari resiko karhutla
2. Membangun pintu klep sehingga air asin tidak menggenangi perkebunan
3. Reboisasi mangrove

3.4. Pilar Hukum dan Tata Kelola

Pada pilar Hukum dan Tata Kelola tantangan terbesar adalah Konflik Tenurial. Ketidakpastian areal kawasan hutan merupakan salah satu yang menghambat efektifitas tata kelola hutan di Indonesia.

Persoalan ketidakpastian tata batas hutan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal yang berdiam dan memanfaatkan lahan dan sumber daya di dalam kawasan hutan, tetapi juga institusi yang memiliki izin usaha kehutanan dan pemerintah. Untuk menjawab tantangan tenurial tersebut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan kebijakan Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya. Sesuai dengan Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016, Perhutanan Sosial bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan Masyarakat [7].

Contoh aktivitas *best practices* dalam menjawab tantangan konflik tenurial antara lain:

1. Masyarakat Lokal di 4 desa di Kuala Indragiri memberikan hak untuk mengolah wilayah pesisir yang diakui oleh Pemerintah Indonesia sebagai daerah penangkapan ikan rajungan (*Scylla Serrata*) kepada Masyarakat Setempat.
2. Masyarakat Lokal di Igal dan Pulau Cawan memberikan hak untuk mengolah wilayah pesisir yang diakui oleh Pemerintah Indonesia sebagai daerah penangkapan kepiting (*Scylla Serrata*) untuk Masyarakat Lokal (Dalam Proses).

3. Masyarakat Adat Suku Duanu di Indragiri Hilir mengadvokasi pemberian hak pengusahaan kawasan pesisir di 11 Desa Menongkah Kerang (anadara granosa) sebagai kearifan lokal Duanu

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian mendalam, strategi dalam mengatasi tantangan pengelolaan lahan rawa gambut untuk pemberdayaan Masyarakat oleh industri dapat dikelompokkan menjadi 4 pilar berdasarkan SDGs yaitu (1) Pilar Sosial dengan membangun kesadaran dan pengetahuan Masyarakat; (2) Pilar Ekonomi yaitu Penciptaan akses pasar, fasilitasi pengembangan hasil hutan bukan kayu, dan akses permodalan sehingga Masyarakat mudah dalam mengembangkan usaha dan terhindar dari ketergantungan kepada middleman; (3) Pilar lingkungan yaitu dengan membangun infrastruktur tanggul, saluran dan pintu klep sehingga tidak terjadi intrusi air asin dan muka air gambut tetap lembab untuk menghindari karhutla; (4) Pilar Hukum tata Kelola strategi terbaik yaitu Perhutanan Sosial.

REFERENSI

- [1] R. Kumalawati, D. Anjarini, and Elisabeth, "Penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut di kabupaten barito kuala provinsi kalimantan selatan," *Pros. Semin. Nas. diselenggarakan Pendidik. Geogr. FKIP UMP*, pp. 263–275, 2019.
- [2] Mubekti, "Studi Pewilayahan Dalam Rangka," *sains dan Teknol. Indones.*, vol. 13, no. 2, pp. 88–94, 2011.
- [3] *Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.*
- [4] S. MARISHA, "ANALISIS KEMAMPUAN POHON DALAM MENYERAP CO2 DAN MENYIMPAN KARBON PADA JALUR HIJAU JALAN DI SUBWILAYAH KOTA TEGALEGA, KOTA BANDUNG," Institut Teknologi bandung, 2018. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttp://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttp://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252%0Ahttp://dx.doi.org>
- [5] U. A. R. Agus Sutopo, Dian Fitriana Arthati, *Kajian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta, 2014. [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/48852-ID-kajian-indikator-sustainable-development-goals.pdf>
- [6] E. a. Elfindri, *Manajemen Pembangunan Kepulauan dan Pesisir. Baduose Media*. 2009.

- [7] *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.*